

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xiii
DAFTAR PUTUSAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Metode Penelitian	9
1.5.1 Tipe Penelitian	9
1.5.2 Pendekatan Masalah	10
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	11
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	12
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis	13
BAB II BATASAN DAN WEWENANG KPPU DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP KASUS PERSAINGAN USAHA	15
2.1 KPPU Dalam Ketatanegaraan Indonesia.....	15
2.2 Wewenang KPPU Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999.....	17
2.3 Peran KPPU Dalam Proses Timbulnya Sangkaan Pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999.....	22

2.4 Keterlibatan KPPU Dalam Penerapan Sanksi Pidana.....	24
BAB III PENEGAKAN HUKUM KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA.....	26
3.1 Persekongkolan Tender Dalam Peraturan Perundang- Undangan.....	26
3.2 Kualifikasi Perbuatan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999.....	32
3.3 Pemidanaan Terhadap Kasus Persaingan Usaha.....	35
3.3.1 Pemidanaan Berdasarkan KUHP.....	35
3.3.2 Pemidanaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999.....	38
3.4 Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 590 K/Pdt.Sus- KPPU/2016.....	40
BAB IV PENUTUP	53
DAFTAR BACAAN	55

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3817);

Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana;

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan

Usaha;

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2019 tentang Tata Catra Pengajuan

Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 941);

Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Di

KPPU.

DAFTAR PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/PDT.SUS-KPPU/2015.